

**BAB III**  
**KONDISI PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN LIMBANGAN**  
**TAHUN 1871-1907**

**3.1 Kondisi Pendidikan Hindia Belanda di Indonesia**

Pada tahun 1870 di Indonesia sedang terjadinya pemberlakuan Undang-Undang Agraria yang diberlakukan oleh Engelbertus de Waal selaku Meteri Jajahan di Hindia Belanda (Indonesia). Penerapan Undang-undang Agraria ini berkaitan dengan dampak pelaksanaan Culturstelsel, yaitu sebuah kebijakan ekonomi yang menekan rakyat untuk melakukan sistem tanam paksa. Sistem ini menekankan diberlakukannya kebijakan dalam meningkatkan produksi tanaman ekspor dan sistem ini juga merupakan sebuah pemberdayaan bagi para petani sebagai bentuk perlindungan atas kepemilikan tanah masyarakat pribumi.<sup>32</sup>

Dampak dari undang-undang agrarian ini dapat mempengaruhi perkembangan bagi perkebunan-perkebunan swasta di Hindia Belanda, terkhusus di Jawa dan Sumatera karena orang pribumi dilindungi haknya atas kepemilikan tanah dan dibebaskan dalam penggunaannya. Pada tahun 1870, di samping selesainya penerapan culturstelsel dan awal dari diterapkannya undang-undang agraria, melihat kepada sisi lain yaitu pada bidang pendidikan, pada masa itu pendirian sekolah-sekolah dikarenakan banyak dari sebagian besar beban yang ditanggung oleh pribumi,

---

<sup>32</sup> Parinduri, 2021, Tersedia online pada: <http://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-undang-undang-agraria-1870-latar-belakang-tujuan-dampak-gaYo>

pembayaran pada akhir abad ke-19 ini mencapai 80% dari jumlah pajak yang dipungut selama masa *culturstelsel* maupun *Agrarische wet* 1870.<sup>33</sup>

Jauh sebelum diberlakukannya undang-undang Agraria di Indonesia, pada tahun 1830 saat itu kekuasaan di Indonesia di tangan Gubernur Van den Bosh, sebagai Bapak “Cultuurstelsel atau Tanam Paksa. Dalam melancarkan pelaksanaan Cultuurstelsel, Van den Bosh sangat membutuhkan bantuan tenaga pekerja yang terdidik. Oleh karena itu, saat Van den Bosh menjabat beliau mengurus bidang pendidikan, baik untuk golongan Eropa maupun untuk Golongan Pribumi.

Beberapa pendidikan untuk penduduk Golongan Eropa juga pada waktu itu terdiri dari Pendidikan Dasar (ELS) *Europeesche Lagere School*. Sekolah ini adalah sekolah yang mencontohkan sekolah dasar yang ada di Belanda, sekolah ini didirikan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh beberapa komisararis Jendral yang mengesahkan dibukanya sekolah pertama untuk anak eropa pada tanggal 24 februari 1817 di Jakarta.<sup>34</sup> Disekolah dasar tersebut diberikan pengajaran menulis, membaca, menghitung, bahasa Belanda, sejarah, dan ilmu bumi, namun kurikulum yang dibuat oleh ELS yang ditetapkan sebagian oleh Belanda tidak relevan dengan pemenuhan keterampilan orang Indonesia. Sekolah ELS ini menentukan pembelajaran pola sekolah rendah 7 tahun.<sup>35</sup> Perkembangan sekolah tersebut mulai pada tahun 1820 yang tersebar di berbagai daerah yaitu Surabaya, Semarang,

---

<sup>33</sup> Sultani,dkk.,2020,hlm.96.

<sup>34</sup> Ekajati,dkk ,hlm.53.

<sup>35</sup> Sultani,dkk.,2020,hlm.97.

Cirebon, Surakarta dan Gersik.

Sedangkan untuk pendidikan Menengah dan Lanjutan pada sekitar pertengahan abad ke-19 jumlah sekolah dasar meningkat, sehingga sebagian anak Eropa sudah mendapatkan pengajaran pendidikan dasar dan dapat melanjutkan pendidikannya ke pada pendidikan menengah dan lanjutan. Pendidikan Menengah dan Lanjutan ini didirikan atas dasar perintah dari Raja Belanda , Willem III yang memberikan kuasa kepada pemerintahan Hindia Belanda mendirikan suatu Gymnasium (sekolah menengah), sekolah ini sekolah menengah pertama didirikan tahun 1860 untuk anak Eropa dengan lama belajar selama 3 tahun. Pada tahun 1867 sekolah tersebut menjadi dua bagian. Bagian A belajar selama 5 tahun dan selanjutnya dapat meneruskan keperguruan tinggi. Bagian B dengan lama belajar 3 tahun. Kemudian dapat melanjutkan kependidikan perwira, pendidikan pegawai negeri atau akademi perdagangan dan kerajinan di Delf, Negeri Belanda. Karena pendidikan tersebut terus berkembang dengan baik maka sekolah Gymnasium tersebut berganti nama menjadi HBS (*Hogere Burger School*) dengan lama belajar 5 tahun.<sup>36</sup>

Masuk pada pendidikan Bumiputra, tujuan utama Hindia Belanda memberikan pendidikan kepada golongan Bumiputra adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Karena untuk keuntungan Belanda agar tidak mendatangkan pegawai dari negaranya, alasannya karena memerlukan biaya yang mahal, sedangkan bila

---

<sup>36</sup> Ekajati, dkk., 1998, hlm.54.

menggunakan tenaga kerja pribumi yang terdidik tidak akan mengeluarkan biaya yang besar. Pendidikan untuk anak pribumi pada tahun 1833 jumlah sekolah dasar saat itu berkembang hingga 19 buah, lalu pada tahun 1845 sekolah tersebut berkembang menjadi 25 buah, pada tahun 1858 terus berkembang sekolah tersebut menjadi 57 buah, pada tahun 1895 menjadi 159 buah, dan kemudian pada tahun 1902 peningkatan tersebut terus berkembang menjadi 173 buah. Van den Bosh selaku Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu (1829/30-1834) juga merasakan bahwa tanpa bantuan penduduk bumiputra yang terdidik usahanya tidak akan berjalan dengan baik, maka pembangunan ekonomi di Hindia Belanda (Indonesia) yang menjadi tugas utama Van den Bosch tidak akan berhasil.<sup>37</sup>

Sekolah untuk Golongan Bumiputra ini di mulai dari sekolah dasar hingga sekolah perguruan tinggi. Sekolah dasar merupakan langkah pertama dalam melaksanakan tujuan tersebut. Pada tahun 1848 tanggal 30 September Raja Belanda mengeluarkan surat keputusan no. 95 yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jendral untuk menyediakan dana sekitar 25.000 gulden per tahun untuk pendirian sekolah Bumiputra di Pulau Jawa yang bertujuan untuk mendidik calon pegawai negeri. Atas dasar wewenang tersebut maka didirikanlah sekolah dasar negeri sebanyak 20 sekolah, dan masing-masing satu sekolah di tiap keresidenan.

Pendirian sekolah ini dalam praktek pengajarannya ternyata yang lebih di utamakan adalah untuk anak-anak Belanda sedangkan anak-anak

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.54-55.

Bumiputra di nomor duakan, hal ini berlangsung sampai sekitar abad ke-19. Pendidikan bumiputra juga terhambat oleh dana yang kecil, bahkan dana tersebut terbagi-bagi ke dalam beberapa pos pendidikan. Atas dasar tersebut pemerintahan kemudian mendirikan departemen khusus untuk menangani masalah pendidikan, agama, dan industry. Dengan adanya departemen tersebut sehingga pendidikan Bumiputra dapat berimbang.

Pada tahun 1864 sekolah meningkat jumlahnya menjadi 186 buah dan pada tahun 1882 menjadi 512 buah. Dana yang di dapatkanpun ikut meningkat menjadi 40.000 gulden untuk pulau Jawa saja. Pendidikan dasar di bagi menjadi dua bagian yaitu Sekolah Dasar Kelas Satu (De Scholen der Eerste Klasse) yang didirikan di ibu kota keresidenan, kabupatem, kewedanaan atau yang sederajat. Murid-murid yang diterima di sekolah ini adalah murid dari golongan masyarakat atas, seperti anak-anak bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka dan oranf-orang bumiputra yang terhormat. kedua adalah Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Tweede Klasse) sekolah ini dibuka untuk memenuhi pendidikan masyarakat umum yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah.

Perbedaan Sekolah Kelas Satu dengan Sekolah Kelas Dua terletak pada lama belajar, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah. Lama belajar pada Sekolah Kelas Dua adalah 5 tahun. Sekolah ini didirikan di distrik-distrik atau kewedanaan-keweaaan sehingga disebut sekolah Distrik.

<sup>38</sup> Sekolah-sekolah yang didirikan adalah sekolah yang mempunyai murid

---

<sup>38</sup> Ekajati, dkk., 1998, hlm.58.

laki-laki dan perempuan, namun sekolah lebih mengutamakan kepada kaum laki-laki yang mendapatkan pengajaran. Keberadaan perempuan pionir pertengahan abad ke-19 pada zaman itu tetap terpinggirkan, bahkan luput dari catatan public dan publikasi, meskipun pendidikan di Jawa Barat sejak itu mulai meningkat.

Pada tahun 1878 pemerintahan Hindia Belanda juga mendirikan sebuah sekolah yang di khususkan untuk kaum bangsawan Sunda di Priangan yaitu sekolah *Hoofdenschool*, sekolah ini khusus untuk anak-anak pegawai pribummi dan untuk keluarga golongan atas, yang nantinya menjadi tenaga administrasi pemerintahan Belanda. Pada tahun 1900 sekolah *Hoofdenschool* ini berganti nama menjadi OSVIA, lalu pemerintahan juga membuka sekolah untuk tingkah menengah yaitu calon-calon pegawai pribumi rendah yaitu sekolah MOVIA atau sekolah pamong praja.<sup>39</sup>

Tahun 1900 adalah tahun dimana terjadi Politik Etis yang di cetuskan oleh Van Deventer, yang memiliki tujuan yaitu irigasi, emigrasi dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Politik Etis ini dicetuskan Van Deventer untuk menebus dosa-dosa dan balas dendam dari kekejaman orang Belanda terhadap masyarakat pribumi. Politik Etis ini membawa perubahan untuk memperbaiki bidang pendidikan pribumi, pengajaran yang diterapkan nya adalah pengajaran selama 6 tahun dengan dibagi menjadi 6 tingkatan kelas.

---

<sup>39</sup> Kusmayadi,2018,hlm.149.

Pada tahun 1914 kelas 1 tersebut di ubah menjadi *Hollands Inlandse Scholl* (HIS), HIS ini adalah suatu kelas pengajaran rendah barat. Pada tahun yang sama dibuka sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yang di dibuka sebagai sekolah lanjutan setelah mengenyam pendidikan di HIS. Lama pembelajaran di MULO yaitu selama 3 tahun, perkembangan sekolah ini menyebar hingga ke Surabaya, Madiun, Kediri, Semarang, Bandung, Malang, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Medan, Makasar dan Padang.<sup>40</sup>

Sekolah lanjutan yang dipakai saat itu adalah AMS (*Algemeene Middelbare School*), sekolah ini adalah sekolah lanjutan menengah atas, sekolah ini adalah sekolah kejuruan yang diperutukan mereka yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sekolah ini buka sejak tahun 1919.

Dua jalur sekolah yang ada di Indonesia pada saat pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu Jalur sekolah anak Eropa dan segelintir Pribumi, yang tadi telah di sebutkan yaitu sekolah ELS yang setara dengan sekolah SD, dengan kurun waktu belajar selama 7 tahun dan yang selanjutnya yaitu HBS yang setara dengan SMP dan SMA dengan lama belajar selama 5 tahun. Jalur yang kedua adalah sekolah anak Pribumi dan timur asing, yaitu HIS yang setara dengan SD lama belajar 7 tahun, lalu MULO setara dengan SMP lama belajar 3 tahun dan yang terakhir AMS yang setara dengan SMA lama belajar 3 tahun.

---

<sup>40</sup> Makmur,dkk.,1993.hlm80.

Kelulusan mereka yang mengenyam pendidikan HBS atau AMS mereka mendapatkan beberapa pilihan untuk melanjutkannya, yang pertama bisa melanjutkan bekerja baik menjadi pegawai swasta, negeri atau masuk militer. Kedua mereka bisa melanjutkan kembali sekolah di Hindia, bisa sekolah dokter di Jawa Stovia, bisa melanjutkannya ke sekolah pertanian Landbouw School, bisa juga melanjutkan sekolah hukum Recht Hoge School, dan mereka juga bisa melanjutkan sekolah teknik yaitu Teknik Hoge School. Ketiga mereka juga dapat melanjutkan sekolah di negeri Belanda.<sup>41</sup>

### **3.2 Kondisi Pendidikan Kabupaten Limbangan**

Kondisi Pendidikan di priangan terutama di Limbangan pada abad 19 masih belum mengalami kemajuan. Pendidikan formal untuk laki-laki maupun perempuan masih belum mengalami kemajuan masih terikat oleh adat, untuk laki-laki yang berada di golongan keluarga kaum bawah juga masih tidak bisa mendapatkan pendidikan formal. Sebelum adanya Pendidikan formal yang didirikan oleh Belanda terutama di pulau Jawa, kondisi Pendidikan pribumi pada saat itu masih berbasis agama atau pendidikan non formal. Begitupun dengan Pendidikan di Limbangan, Lembaga Pendidikan Islam pada saat itu yaitu Pendidikan Pesantren dengan pengajaran seperti membaca Al-Qur'an, Hadist, maupun yang dikupas dalam kitab-kitab klasik yaitu Kitab Kuning.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Matanasi, 2016, tersedia online <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belanda-bXbV>

<sup>42</sup> Saifullah, 2015, hlm. 3.

Pendidikan pesantren di Limbangan pada saat itu dijadikan sebagai sekolah non formal yang di gunakan masyarakat sekitar karena mudah untuk masuk dan belajar di pesantren sebab tidak ada aturan kasta yang memberatkan masyarakat tersebut. Murid dan lama pembelajaran di pesantren yang ada di Limbangan tidak sama, ada yang lama pembelajarannya hanya 1 tahun pembelajaran dan ada yang sampai 10 tahun. Sedangkan orang yang mendapatkan pendidikan sejak zaman kolonial hanya di bisa didapatkan oleh keluarga golongan atas, itu pun tidak dilakukan di Limbangan melainkan menjalankan pembelajaran sekolah kolonial tersebut di luar daerah Kabupaten Limbangan.

Pendidikan untuk laki-laki saat itu masih dapat tertolong oleh pendidikan pesantren meskipun tidak meluas dalam mendapatkan ilmu pengetahuannya, sedangkan pendidikan untuk perempuan masih susah untuk di dapatkan karena seorang perempuan masih sangat terikat dengan sebuah adat, peristiwa seorang perempuan yang masih terikat oleh adat tersebut di munculkan pada fenoma “nyai”. Nyai disini dianggap sebagai perempuan yang dipelihara oleh pejabat colonial atau swasta-swasta Belanda yang kaya raya. Mereka kemudian dijadikan untuk mengurus rumah tangga dan mengurus kebutuhan nafsu ranjang para tuan-tuanya. Kebanyakan para “nyai” tersebut berasal dari kalangan bawah seperti petani yang dijual oleh keluarganya untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Harpiah, 2017, hlm. 23-24.

Keadaan perempuan seperti fenomena “nyai” tersebut merupakan salah satu dampak dari kurangnya pengetahuan dan keterbelakangan Pendidikan di kalangan perempuan. Salah satu yang sering menjadi sasaran kebodohan tersebut adalah perempuan-perempuan dari keluarga kalangan bawah. Mereka tidak tahu mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan sehingga harga diri perempuan dirampas oleh keadaan akibat keterbelakangan Pendidikan.

Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak entah itu laki-laki ataupun perempuan agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>44</sup> Pada ungkapan tersebut memiliki makna bahwa pendidikan akan memberikan keselamatan dari marabahaya dan menjadi cahaya untuk dirinya sendiri. Apabila pendidikan sudah maju maka penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap derajat perempuan tidak akan terjadi lagi.

Beberapa sekolah dan pendidikan yang sudah berkembang di beberapa wilayah Pulau Jawa bahkan di Jawa Barat tidak menutup kemungkinan bahwa sejarah pendidikan di Limbangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda belum tertarik mendirikan sekolah formal dengan sistem Barat atau Belanda. Sedangkan untuk kebutuhan tenaga kerja birokrasi pemerintahan masih di datangkan dari Belanda, sedangkan untuk bupati kebawahnya di ambil dari keluarga priayi yang sudah dilatih

---

<sup>44</sup> Sholichah, 2018, hlm. 28.

sebelumnya. Karena adanya perubahan dan perkembangan pada waktu itu di bidang politik dan ekonomi sehingga membutuhkan tenaga terdidik. Maka dari itu hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk membuka lembaga pendidikan.

Pendidikan untuk Bumiputra pada tahun 1850 memiliki tujuan hanya sekedar untuk bisa tulis-baca aksara latin dalam bahasa daerah dan melayu. Sedangkan pada tahun 1851 pendidikan untuk masyarakat pribumi mulai menampakkan hasil, misalnya data perkembangan siswa si priangan tahun 1853 terdapat 125 orang murid, lima sekolah. Tiap tahun jumlah muridnya terus naik hingga tahun 1872 mencapai 383. Meskipun bidang pendidikan tersebut meningkat, anak-anak pribumi di Limbangan tetap tidak bisa mendapatkan pendidikan, apalagi bagi masyarakat umum terlahir dari keluarga biasa atau dari kalangan bawah.

Pendidikan tersebut hanya bisa di dapatkan oleh kaum Bangsawan, atau golongan atas. Sejak pendidikan di beberapa wilayah Jawa Barat perlahan berkembang, sejak saat itu pendidikan di Kabupaten Limbangan belum ada sekolah Belanda atau sekolah formal yang telah berdiri seperti di luar daerah Kabupaten Limbangan. Meskipun dari slogannya disebutkan untuk membudayakan dan meningkatkan kecerdasan kaum pribumi, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua penduduk pribumi dapat menjadi pesertadidik pada sekolah-sekolah itu.<sup>45</sup> Pada pertengahan abad ke-19 sekolah Belanda di buka di beberapa Kota, namun Kabupaten Limbangan

---

<sup>45</sup> Ajisman, dkk ,2017,hlm.157.

tidak termasuk kedalam wilayah yang akan didirikannya sekolah formal, padahal pendidikan Barat tersebut menjadi sebuah keharusan bagi para kaum golongan priayi yang menginginkan keturunannya yang akan menggantikan kedudukannya. Pendidikan Barat dan kemampuan berbahasa Belanda telah dimasukkan menjadi salah satu persyaratan bagi calon pejabat.

Keluarga priayi melakukan berbagai cara untuk keturunannya mendapatkan pendidikan, hal ini dilakukan oleh Raden Haji Muhammad Musa kepada Raden Ayu Lasminingrat yang memberikan pendidikan kepada anaknya di Sumedang di sekolah Eropa dengan menitipkannya di rumah sahabatnya yaitu keluarga Levyssohn Norma pada tahun 1860, karena di Limbangan waktu itu belum ada sekolah formal atau sekolah barat.

Pada tahun 1874 itu merupakan zaman dimana R.H Moehamad Moesa sebagai tokoh pribumi pertama yang mendirikan sekolah Eropa di Kabupaten Limbangan yaitu Sekolah Bijzondere Europeesche School. Sekolah ini di anggap sebagai pintu berubahan bagi peradaban bangsa yang terjajah di Nusantara. Guru yang didatangkan di sekolah ini adalah 2 orang Eropa, dan guru lainnya adalah anaknya sendiri yaitu R.A Lasminingrat.<sup>46</sup>

Pelajaran yang digunakan di sekolah Bijzondere Europeesche School yaitu membaca dan menulis latin/ melayu, buku yang digunakan sebagai bahan rujukan di sekolah tersebut adalah karya dari R.H Moehamad Moesa beserta keluarganya yaitu R.A Lasminingrat, Kartawinata, dan

---

<sup>46</sup> Effendie, 2011, hlm. 36.

Lengga Kencana. Buku-buku mereka di jadikan pula sebagai buku bahan rujukan bacaan resmi anak-anak sekolah di priangan yang diterbitkan sejak tahun 1862-1912, buku tersebut dilakukan dalam beberapa cetakan ulang dengan menggunakan terjemahan bahasa Melayu dan Jawa.<sup>47</sup>

Tindakan R.H Moehamad Moesa itu tentu saja tidak populer di kalangan umat muslim khususnya di daerah kabupaten Limbangan, karena anggapan mereka kaum muslimin belajar di sekolah Eropa sama saja dengan mempelajari ilmu orang kafir. Meskipun ayah dari R.A Lasminingrat tersebut dipandang sebagai seorang yang oportunistis dan ambisius, karena kedekatan beliau dengan pemeritahan kolonial sejak saat itu dianggap sebagai penjiilat, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya. Tapi pemikiran beliau terhadap Eropa sangatlah terbuka, bahkan R.H Moehamad Moesa tidak segan-segan mengeluarkan dana sendiri untuk keberlangsungan sekolah yang didirikannya di Kabupaten Limbangan tersebut.

Tekad yang kuat dari R.H Moehamad Moesa tersebut membuktikan bahwa pendidikan di Limbangan sangat perlu di kembangkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat Limbangan kedepannya agar lebih maju dan dapat mengetahui pengetahuan secara lebih luas, bahkan atas kerja kerasnya dan tidak mengenal putus asa atas omongan-omongan orang yang tidak setuju dengan jalan R.H Moehamaad Moesa, beliau buktikan dengan adanya murid-murid di sekolah yang didirikan R.H Moehamad Moesa di

---

<sup>47</sup> Effendie,2011,hlm.41.

Limbangan tersebut mencapai 100 orang.

Sekolah Eropa *Bijzondere Europeesche School* di kabupaten Limbangan itu terus berkembang bahkan pada tahun 1876 sekolah tersebut mendapatkan subsidi dana dari pemerintahan sebesar 100 gulden perbulannya. Perkembangan sekolah yang didirikan di kabupaten Limbangan tersebut merupakan hal yang penting dalam kemajuan pendidikan. Bahkan R.H Moehamad Moesa itu sangat menghargai betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan, dan itulah salah satu alasan beliau mendirikan sekolah yang dapat di peroleh oleh laki-laki dan perempuan. Namun meskipun demikian, pendidikan yang di khususkan laki-laki dan perempuan tersebut tetap saja tidak mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan pendidikan perempuan tersebut.

Awal abad ke 20 tersebut merupakan suatu periode yang penting dalam sejarah Indonesia, abad tersebut merupakan abad terjadinya sebuah politik etis dan juga mmberikan pengaruh terhadap gerakan perempuan, dan juga dapat menciptakan masyarakat perkotaan sebagai masyarakat yang akrab dengan modernitas, dan hal ini yang mendukung adanya kemajuan.<sup>48</sup>

Kedudukan perempuan saat itu masih sangat rendah, termasuk di Kabupaten Limbanagn, sampai-sampai Bupati Bandung R.A.A. Martanagara yang memiliki pemikiran maju sempat menyatakan wanita itu tidak perlu sekolah. Sehingga peranan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat feodal menjadi terpinggirkan dan harus slalu berada di belakang

---

<sup>48</sup> Ajisman,dkk.,2017,hlm. 183.

suami atau ayah mereka. Pendidikan bagi perempuan masih di anggap tabu atau tidak perlu. Adat istiadat Sunda masa itu, menilai tidak penting perempuan harus pintar: *keur naon awewe sakola da ahirna ka dapur deui ka dapur deui*. (untuk apa wanita sekolah, tokh akhirnya ke dapur lagi).<sup>49</sup> Bahkan perempuan masih selalu di atur oleh orang tua dalam memilih pasangannya, peristiwa tersebut juga terjadi di kalangan perempuan kabupaten Limbangan. Masalah kurangnya pendidikan perempuan juga dianggap sebagai penyebab utama munculnya masalah-masalah bagi perempuan. Namun pepatah adat istiadat Sunda di atas dapat terbantahkan oleh R.A Lasminingrat, beliau adalah perempuan pertama yang mendapatkan pendidikan Eropa dan ide tentang emansipasi memasuki Hindia juga datang melalui bacaan dari Eropa. Pendidikan perempuan perlahan-lahan berubah setelah R.A Lasminingrat mendapatkan pendidikan di Kabupaten Sumedang dan setelah ayahnya mendirikan sekolah, meskipun sekolah tersebut tidak sepenuhnya di dukung oleh masyarakat kabupaten Limbangan.

Lasminingrat adalah anak perempuan R.H Moehamad Moesa dari Istrinya Raden Ajoë Rija, adalah perempuan Sunda pertama yang mendapatkan pendidikan Barat pada sekitar 1860-an,-Kartini saat itu belum lahir- Jadi informasi Pramoedya menyesatkan. Pada saat itu perhatian dikalangan tertentu pejabat pemerintahan kolonial terhadap pendidikan bagi kaum perempuan sunda mulai dilakukan, sehubungan dengan gelombang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.73.

kesetaraan dan feminisme yang tengah berkecambah di Eropa zaman itu.<sup>50</sup>

Berjalannya waktu, pendidikan perempuan terus berjalan di Kabupaten Limbangan hingga pada tahun 1893, ketertarikan dan dukungan terhadap dunia pendidikan pertama kali terlihat ketika beliau membantu Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Pada suatu waktu, Raden Dewi Sartika anak seorang Pnyai Sunda mendapatkan kesulitan dalam upayanya mendirikan sekolah. Pada saat itu, Bupati Bandung R.A.A Martanegara tidak memberikan izin kepada Dewi Sartika dikarenakan adanya anggapan bahwa Sartika adalah anak seorang pemberontak Bupati Bandung. Kemudian atas rekomendasi dan usulan dari R.A Lasminigrat kepada Bupati Bandung R.A.A Martanegara supaya memberikan izin untuk mendirikan sekolah bagi Raden Dewi Sartika. Sehingga pada tahun 1904 Dewi Sartika diizinkan mendirikan sekolah istri dan kemudian berganti sekolah kautamaan istri pada tahun 1914. Mereka berdua sama-sama mendukung pergerakan kaum perempuan untuk terus maju di dalam bidang pendidikan.<sup>51</sup>

Pada abad ke 20 tersebut juga merupakan abad dimana perkembangan pendidikan perlahan-lahan maju karena mendapatkan pengaruh dari adanya politik etis yang di bawa oleh tokoh Belanda yaitu Van Deventer yang di dalamnya membahas mengenai irigasi, emigrasi dan pendidikan. Pengaruh politik etis ini memberikan dampak yang begitu baik

---

<sup>50</sup> Efendi,2011,hlm. 75.

<sup>51</sup> *Ibid.*,hlm.184.

bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, begitu juga yang dirasakan di daerah kabupaten limbangan, pengaruh politik etis sekaligus pengaruh yang dapat di petik R.A Lasminingrat saat membantu Raden Dewi Sartika membuat dirinya mendapat ketertarikan yang akhirnya Raden Ayu Lasminingrat mendirikan sekolah perempuan di kabupaten Limbangan. Raden Ayu Lasminingrat pada tahun 1907 Mendirikan *Sakola Kaoetamaan Istri* di ruang gamelan pendopo. Murid-murid diambil dari anak-anak wanita dikalangan kerabat keluarga.<sup>52</sup> Pelajaran di sekolah tersebut pada dasarnya sama dengan pelajaran yang diberikan di sekolah Raden Dewi Sartika, yaitu menulis, membaca dan keterampilan wanita, seperti menjahit, menyulam, merenda, membordir, merajut, membantik, dan kerajinan tangan wanita lainnya, misalnya membuat hiasan dari kerangka daun-daunan dan serat nenas yang telah diberi warna, membuat taplak meja, alas duduk, badingkut (selimut) dan kerajinan lain dari guntingan-guntingan kain sisa jahitan. Di sekolah kautamaan istri juga murid-muridnya diajari cara memasak, merapikan pakaian, mencuci, menjahit pakaian dan segala yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.<sup>53</sup>

Seiring berjalannya waktu sekolah kautamaan istri menurut catatan Volksalamanan memiliki gedung sendiri dan perkembangan pendidikannya terus berjalan dengan baik sehingga mendapatkan banyak murid sampai dengan 200 murid. R.A Lasminingrat juga melakukan penguatan status

---

<sup>52</sup> Effendie,2011,hlm.133.

<sup>53</sup> Ajisman,dkk.,2017,hlm.187.

sekolah dengan melakukan kunjungan ke Istana Bogor untuk menghadap Gubernur Jendral. Secara resmi, sekolah yang didirikan oleh Raden Ayu Lasminingrat tersebut disahkan sebagai lembaga pendidikan yang dinamakan *Vereeniging Keutamaan Istri Schoolen*, dengan akta Nomor 12, pada 12 Februari 1913. (Gatra, 14 Oktober 2011, h. 52) Setelah memiliki status untuk menjadi lembaga pendidikan, sekolah tersebut beganti nama menajadi Sekolah Rakyat (SR) dan pada saat itu awal mula sekolah tersebut mulai menerima murid laki-laki, Lasminingrat kemudian juga mendirikan sekolah di berbagai wilayah. Sekolah serupa juga didirikan di Distrik Tarogong, Bayongbong, dan juga Cikajang. Ketiga wilayah tersebut merupakan kecamatan di Kabupaten Garut.<sup>54</sup>

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Limbangan yang di perjuangkan R.A Lasminingrat tersebut tidak hanya pendidikan formal untuk anak-anak laki-laki dan perempuan saja, bahkan sisa umur hidup beliaau perjuangkan untuk masyarakat Limbangan dengan cara mengajarkan ibu-ibu dalam mengaji. Pendidikan yang di Limbangan tersebut terus berkembang hingga tahun 1950 sekolah SR tersebut berganti nama menjadi SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang terbagi menjadi dua yaitu sekolah Ranggalawe I dan IV, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut. Kemudian hingga tahun 1990-an hingga sekarang sekolah tersebut berubah lagi menjadi sekolah SDN Regol VII dan X.

---

<sup>54</sup> *Ibid*,201,.hlm.187-188.